



Subag Humas dan TU
BPK Pwk. Prov. Sulawesi Tengah

Tahun :

2	0	1	7
---	---	---	---

Bulan :

<input checked="" type="checkbox"/>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	<input checked="" type="checkbox"/>	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Entitas :

										<input checked="" type="checkbox"/>					
Provinsi	Palu	Donggala	Tolitoli	Buol	Sigi	Morowali Utara	Parigi Moutong	Poso	Morowali	Tojo Una-una	Banggai	Banggai Kepulauan	Banggai Laut		

Devisit anggaran 2016 tunggu hasil BPK

POSO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Poso mengalami devisit anggaran di tahun 2016 hingga mencapai Rp 50 miliar. Dampaknya sejumlah tagihan kegiatan yang sudah dikerjakan SKPD, seperti proyek fisik, sampai sekarang tidak bisa dibayar. Termasuk di dalamnya Anggaran Dana Desa (ADD) yang menyentuh Rp 7 miliar.

Wakil Bupati (Wabup) Samsuri MSI, membenarkan terjadinya devisit anggaran di pemerintahannya pada tahun 2016. Tapi dia enggan menyebut penyebab terjadinya devisit hingga Pemkab harus berutang puluhan miliar. Kata Wabup, persoalan devisit anggaran 2016 biar BPK yang menilai dan menawabnya. "Penyebabnya apa dan kenapa bisa terjadi serta siapa yang bertanggung jawab nanti akan dijawab semua setelah



Samsuri

BPK melakukan pemeriksaan," ujarnya, Selasa (10/1). Pemeriksaan BPK terhadap keuangan Pemkab Poso tahun 2016 akan dilakukan secepatnya. Disitulah semua tindakan penggunaan keuangan daerah akan terkuak. Terkait solusi yang akan dilakukan Pemkab untuk menyelesaikan banyaknya

tagihan utang kegiatan fisik dan juga dana ADD, Wabup menyebut bergantung juga pada hasil pemeriksaan BPK. "Kalau (devisit) itu terjadi karena kelalaian, maka yang bertanggung jawab ya yang lalai. Tapi kalau terjadinya karena bukan kelalaian seseorang maka tentu akan ada solusi dari Pemkab," jelasnya.

Dari informasi yang diperoleh di lingkup Pemkab Poso, kegiatan terbanyak yang belum terbayar karena devisit anggaran tahun 2016 ada di Dinas PU yang mencapai angka Rp 19 miliar. Kegiatan yang belum dibayar di Dinas PU tersebut berupa kegiatan proyek fisik. Jika soal penyebab devisit anggaran Wabup enggan berkomentar, tidak demikian soal gaji PNS bulan Januari yang hingga kemarin (Selasa) belum dibayar. ■